



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Tahunan ini dibuat dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan dan kebijakan operasional di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang. Selain itu dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang. Kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan penyusunan laporan kinerja ini, sehingga dapat menjadi bahan yang objektif bagi perencanaan pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Bengkayang.

Bengkayang, 2019
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Bengkayang

Drs. PINUS SAMSUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660504 199303 1 016



DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi	3
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	5
5. Sumber Daya Keuangan	6
6. Sarana dan Prasarana	7
B. Permasalahan Utama	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang	10
1. Visi	10
2. Misi	11
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama	12
B. Perjanjian Kinerja (PK) 2019 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang	14
C. Rencana Aksi Tahun 2019 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	19
2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan Target Kinerja Tahun 2019	23
B. Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP	28
A. Kesimpulan	28
B. Saran	29
LAMPIRAN TABEL	





BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Perencanaan merupakan awal dari segala sesuatu yang hendak dilakukan atau dicapai dengan periode waktu tertentu. Kegiatan pada proses awal ini antara lain mencari dan menghimpun data yang selanjutnya diolah menjadi dokumen perencanaan dalam optimalisasi pembangunan kawasan perbatasan yang berkelanjutan. Menjadi fokus perencanaan yaitu memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di lokpri kawasan perbatasan yang menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dengan pendekatan ekonomi pada masyarakat perbatasan.

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi pada Kinerja akan mengedepankan pada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 21). Selanjutnya dipertegas dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang.



2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang terdiri dari :

a. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah unsur pimpinan mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah berdasarkan Kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Sekretariat Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan umum, keuangan dan kepegawaian serta tugas-tugas lainnya di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Dua Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

c. Bidang Koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama

Bidang Koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perbatasan Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (Dua) Sub Bidang terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan
2. Sub Bidang Fasilitasi Kerjasama Kawasan Perbatasan

Setiap Sub Bidang membantu Kepala Bidang Koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama dalam menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan program di Sub Bidangnya masing-masing.

d. Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring Dan Evaluasi



Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring Dan Evaluasi, dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah melalui Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (Dua) Sub Bidang terdiri dari:

1. Sub Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan
2. Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengawasan Batas Negara

Setiap Sub Bidang membantu Kepala Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring Dan Evaluasi dalam menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan program di Sub Bidangnya masing-masing.

e. Bidang Penataan Batas Daerah

Bidang Penataan Batas Daerah, dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah melalui Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (Dua) Sub Bidang, terdiri dari:

1. Sub Bidang Penataan Batas Desa dan Kecamatan
2. Sub Bidang Penataan Batas Kabupaten

Setiap Sub Bidang membantu Kepala Bidang Penataan Batas Daerah dalam menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan program di Sub Bidangnya masing-masing.

f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) hingga saat ini belum terisi atau belum difungsikan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional yang hingga saat ini belum terisi atau belum difungsikan dan sedang direncanakan untuk diadakan, difungsikan/diisi. Hal ini disebabkan, belum ada PNS yang memilih Jabatan Fungsional.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang adalah urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang koordinasi



perencanaan dan fasilitasi kerjasama serta dibidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Kabupaten Bengkayang yang diserahkan oleh Bupati yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai fungsi antara lain :

1. Penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan;
2. Pengordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
3. Penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
4. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama;
5. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
6. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; dan
7. Pelaksanaan fungsi perbantuan dan fungsi lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang merupakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama serta dibidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Kabupaten Bengkayang sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang. berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. Dengan demikian dipandang perlu untuk menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang, yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, Tiga Bidang, Dua Sub Bagian, Enam Sub Bidang, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional.



4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang didukung jumlah aparatur/pegawai sebanyak 21 orang dan 4 orang tenaga honorer. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian, golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1.A.4 berikut ini :

Tabel 1.A.4

Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian, Golongan dan Jenis Kelamin

NO	STATUS / JENIS KELAMIN		GOL. I				GOL. II				GOL. III				GOL. IV				JUMLAH
			a	B	C	D	a	b	c	d	A	B	c	d	a	b	c	D	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	PNS	L	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	2	4	1	-	1	-	17
		P	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	5
JUMLAH PNS			-	-	-	-	-	-	3	1	5	3	2	5	2	-	1		22
II	CPNS	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH CPNS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL			-	-	-	-	-	-	3	1	5	3	2	5	2	-	1	-	22

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 22 orang dan tenaga honorer sebanyak 4 orang yang tersedia pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2019 yang terdiri dari :

❖ **Jumlah Pegawai menurut Pangkat dan Golongan**

- Golongan IV	3 Orang
- Golongan III	15 Orang
- Golongan II	4 Orang
Jumlah	<u>22 Orang</u>

❖ **Jumlah Pegawai menurut Eselon**

- Eselon II	1 Orang
- Eselon III	4 Orang
- Eselon IV	7 Orang
- Staf Non Eselon	10 Orang
Jumlah	<u>22 Orang</u>



❖ **Jumlah Pegawai menurut Pendidikan**

- Doktor (S3)	0 Orang
- Pasca Sarjana (S2)	3 Orang
- Sarjana (S1) / Diploma IV	11 Orang
- Diploma D3	1 Orang
- SLTA/SMK	7 Orang
- Lainnya	0 Orang
Jumlah	22 Orang

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang 2019

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya-upaya penambahan jumlah aparatur di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang.

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam tahun 2019, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 556.770.000,00** sedangkan Belanja Langsung sebesar **Rp. 907.925.000,00**.

Tabel 1.A.5
Sumber Daya Keuangan
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2019

No	Jenis Belanja	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	0	556.770.000,00	556.770.000,00	0
	- Belanja Pegawai	0	556.770.000,00	556.770.000,00	0
2	Belanja Langsung	0	907.925.000,00	907.925.000,00	0
	- Belanja Pegawai	0	186.831.500,00	186.831.500,00	0
	- Belanja Barang dan Jasa	0	694.889.250,00	694.889.250,00	0
	- Belanja Modal	0	26.204.250,00	26.204.250,00	0
	Jumlah	0	1.464.695.000,00	1.464.695.000,00	0



6. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang menggunakan sarana dan prasarana dalam keadaan baik (B) dan yang rill/ada terdiri dari :

NO	NAMA SARANA PRASARANA	JUMLAH	KEADAAN		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
1	2	3	4	5	6
1	Tanah dan Gedung	1		1	
2	Kendaraan Roda 4	1	1		
3	Kendaraan Roda 2	1	1		
4	Global Positioning System (GPS)				
5	Komputer PC	4	3		1
6	Rak Besi/Metal	1	1		
7	Rak Kayu				
8	Filling Cabinet	4	4		
9	Brankas				
10	Lemari Kaca				
11	Lemari Kayu				
12	Kursi Rapat	35	35		
13	Kursi Tangan				
14	Kursi Lipat				
NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KEADAAN		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
1	2	3	4	5	6
15	Sofa	3	2		1
16	Mesin Potong Rumput	1			1
17	AC Split	1	1		
18	Kipas Angin	5	5		
19	Televisi	2	2		
20	Sound System				
21	Unit Power Supply				
22	Camera Vidio				
23	Camera Digital	1	1		
24	Karpet/Bidai	2	2		



25	Local Are Network (LAN)	1			
26	Laptop	1	1		
27	Printer	5	1	1	3
28	CPU	5	2	2	1
29	Meja Kerja Pejabat Es. II	1	1		
30	Meja Kerja Pejabat Es. III	2	1	1	
31	Meja Kerja Pejabat Es. IV	1	1		
32	Meja Rapat	15	15		
33	Kursi Kerja Pejabat Es. II	1	1		
34	Kursi Kerja Pejabat Es. III	3	3		
35	Kursi Kerja Pejabat Es. IV				
36	Lemari Arsip	2	2		4
37	Camera & Attachment	1	1		
38	Proyektor & Attachment	1	1		
39	Infocus				
40	Global Positioning System				
41	Stabilizer 2000 W				
42	Adaptor				
43	Parabola Portable	1	1		
44	Teralis				

B. PERMASALAHAN UTAMA

Laporan Kinerja Tahunan (LKj Tahunan) disusun wujud nyata dalam memenuhi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan RB NO. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Tahunan (LKj Tahunan). Laporan Kinerja Tahunan (LKj Tahunan) merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Tahunan (LKj Tahunan) disusun dengan maksud adalah sebagai pelaporan atas pelaksanaan dokumen rencana daerah sesuai dengan ketentuan terkait laporan penyelenggaraan pemerintahan dan tujuan adalah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian hasil pelaksanaan misi Badan Pengelola Perbatasan Daerah



dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Adapun isu strategis dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

- 1) Belum berkembangnya industri pengolahan, sehingga produk yang dihasilkan masih bahan mentah dengan nilai tambah yang relatif kecil bagi perekonomian wilayah;
- 2) Belum berkembangnya sarana penunjang usaha seperti gudang penyimpanan hasil komoditi pertanian Keterbatasan infrastruktur dasar penunjang perekonomian seperti jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, dan transportasi jalan penghubung desa;
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana listrik, transportasi dan telekomunikasi menyebabkan terisolasinya kawasan perbatasan. Jika hal ini dibiarkan akan lebih menambah kesenjangan dan ketertinggalan ekonomi perbatasan;
- 4) Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat akibat masih belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- 5) Aksebilitas menuju kelokasi perbatasan belum memadai dan infrastruktur jalan belum optimal;
- 6) Rendahnya tingkat pelayanan kesehatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
- 7) Belum memadainya fasilitas pendukung untuk kawasan perbatasan (PLB, PPLB, Bea Cukai, Imigrasi, CQIS);



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

RENSTRA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang disusun dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2016-2021. RENSTRA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam RENJA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

VISI DAN MISI

Untuk dapat mewujudkan suatu perencanaan pembangunan kawasan perbatasan yang berkelanjutan serta berorientasi masa depan. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

1. VISI

Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang. Visi yang ditetapkan harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang akan dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreativitas dalam pelaksanaannya. Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Dapat dibayangkan (imaginable) oleh pimpinan dan staf;
- b. Memiliki nilai yang diinginkan (desirable) oleh pimpinan dan staf;
- c. Memungkinkan untuk dicapai (achievable);
- d. Terfokus pada permasalahan utama;
- e. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 20 tahun) dan tidak mengabaikan perkembangan;
- f. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholders.



Berdasarkan kriteria dan persyaratan yang ada maka ditetapkan Visi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang adalah :

“Terwujudnya Kawasan Perbatasan yang Maju dan Berdaya Saing”

Penjelasan Visi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya Kawasan Perbatasan yang Maju adalah Badan Pengelola Perbatasan Daerah menjadi pendorong dan fasilitator dalam pembangunan dan kemasyarakatan di kawasan perbatasan dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mampu bersaing, sehingga kawasan perbatasan menjadi gerbang kesejahteraan masyarakat.

2. MISI

Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja.

Pernyataan misi mengandung makna yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang. Jadi untuk lebih eksis dan dapat mengikuti efek global otonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Sinkronisasi Perencanaan, Pengembangan Pembangunan Kawasan Perbatasan.
- b. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya dalam Rangka Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan.
- c. Meningkatkan efektifitas dalam koordinasi, fasilitasi kerjasama pelaksanaan pengelolaan perbatasan negara.
- d. Meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pemeliharaan serta pengawasan pengelolaan perbatasan.
- e. Peningkatan kerjasama dalam pemanfaatan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan masyarakat.



3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (Tiga) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan Strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan Strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 3 (Tahun) tahun dan dialokasikan dalam 5 (Tiga) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Penetapan sasaran Strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau operasional tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 3 (Tiga) tahun.

Sasaran Strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan Strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang terkait dengan masing-masing misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : “Mewujudkan Sinkronisasi Perencanaan, Pengembangan Pembangunan Kawasan Perbatasan”

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tersebut di atas adalah:

T u j u a n	S a s a r a n
1. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat wilayah perbatasan.	1. Tersedianya sumberdaya manusia wilayah perbatasan yang memiliki kemampuan kewirausahaan. 2. Terwujudnya program pembinaan/diklat bidang ekonomi bagi masyarakat perbatasan



Indikator Kinerja Utamanya adalah :

- a. Terwujudnya program pembinaan/diklat bidang ekonomi bagi masyarakat perbatasan;

Misi Kedua : “Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya dalam Rangka Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan”

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tersebut di atas adalah :

T u j u a n	S a s a r a n
1. Meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat perbatasan melalui program stimulus yang berasal dari APBD dan APBN.	1. Tersedianya perencanaan dan program yang mengarah pada pembangunan ekonomi perbatasan.

Indikator Kinerja Utamanya adalah :

- a. Meningkatnya program stimulus ekonomi kemasyarakatan.

Misi Ketiga : “Meningkatkan efektifitas dalam koordinasi, fasilitasi kerjasama pelaksanaan pengelolaan perbatasan Negara.”

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tersebut di atas adalah :

T u j u a n	S a s a r a n
1. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan.	1. Meningkatnya infrastruktur transportasi di wilayah perbatasan.

Indikator Kinerja Utamanya adalah :

- a. Meningkatnya aksesibilitas wilayah perbatasan.

Misi Keempat : “Meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pemeliharaan serta pengawasan pengelolaan perbatasan.”

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tersebut di atas adalah :



T u j u a n	S a s a r a n
1.Meningkatnya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat di wilayah perbatasan.	1. Terwujudnya pembangunan kebutuhan dasar masyarakat perbatasan yang terpadu.

Indikator Kinerja Utamanya adalah :

- b. Terwujudnya wilayah perbatasan sebagai daerah prioritas untuk program pembangunan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat.

Perjanjian Kinerja 2019 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang.

Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan RENSTRA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang, yang akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan tahun 2019.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya yang meliputi indikator *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*. Dokumen Perjanjian Kinerja juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Penetapan indikator-indikator kinerja baik pada tingkat sasaran maupun pada tingkat kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2019 telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja yang memuat program ataupun kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019-2021. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 yang diturunkan kedalam program kegiatan tercantum dalam tabel berikut :



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
TAHUN 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1	Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Pembangunan di Segala Bidang Pada Daerah Perbatasan.	1	Tingkat kerjasama yang baik dalam percepatan Pembangunan di Kawasan Perbatasan.	95%
		2	Tingkat kerjasama yang baik dalam Sosial Ekonomi di Kawasan Perbatasan.	100%
		3	Tingkat kerjasama yang baik dalam Penataan Kawasan / Wilayah Perbatasan.	100%
		4	Tingkat persiapan, kesiapan, dan kelayakan Pembukaan Border Jagoi Babang.	80%
		5	Tingkat Kesesuaian Kerjasama Lintas Sektor dalam perencanaan di Wilayah Perbatasan.	100%
		6	Tingkat Kesesuaian Lintas Batas Antar Negara dalam perencanaan di Wilayah Perbatasan.	100%
		7	Meningkatnya Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Negara.	90%
		8	Tingkat Kejelasan dan Kepastian Batas Daerah Kabupaten Bengkayang.	90%
		9	Tingkat kejelasan dan kepastian batas Kecamatan.	95%
		10	Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas Informasi Tanda Batas Negara.	85%
		11	Tingkat Kecukupan dan Kelayakan Tanda Batas Antar Negara.	85%
		12	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Batas Negara.	100%
		13	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Potensi Perbatasan.	100%
		14	Prosentase Alokasi Anggaran Melalui Dana Sharing Pemerintah Pusat.	100%



		15	Prosentase Optimalisasi Sosial Budaya di Kawasan Perbatasan.	100%
		16	Prosentase informasi kegiatan Pembangunan Bidang Potensi Kawasan Perbatasan yang telah diketahui masyarakat.	100%
		17	Prosentase Jumlah Database Potensi di Kawasan Perbatasan.	90%
		18	Tingkat kesesuaian kegiatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.	90%
		19	Tingkat persiapan, kesiapan, dan kelayakan pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.	95%
		20	Prosentase Jumlah Database Infrastruktur Fisik, Infrastruktur Pemerintahan, Sosial Ekonomi Desa Kawasan Perbatasan.	90%

B. RENCANA AKSI TAHUN 2019 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

Rencana aksi ini menggambarkan dan menguraikan serta menjelaskan bagaimana Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut dari sektor yang bersangkutan akan diterapkan dan dicapai dalam periode tertentu, atau bagaimana proses dan tahapan atau mekanisme penerapan dan pencapaian SPM. Kegunaan dan manfaat dari rencana aksi adalah sebagai :

1. Alat koordinasi bagi para pihak yang berkepentingan dalam penerapan dan pencapaian SPM;
2. Pedoman dan arahan dalam perencanaan atau penyusunan rencana tahunan penerapan dan pencapaian SPM termasuk dalam penganggaran tahunannya;
3. Pedoman dan arahan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM;
4. Pedoman dan arahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM;
5. Pedoman dan arahan bagi pelaporan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM serta memberikan umpan balik dan rekomendasi bagi penyusunan rencana aksi periode selanjutnya;
6. Pedoman dan arahan untuk memudahkan pengintegrasian penerapan dan pencapaian SPM ke dalam mekanisme dan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Adapun Penyusunan Rencana Aksi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 tercantum dalam tabel 2.C.1 (*lampiran Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2019*).



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Tahunan SKPD. Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengetahui hasil capaian kinerja pada suatu organisasi SKPD dapat dilakukan dengan analisis capaian kinerja untuk beberapa hal berikut ini :

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	IKU		Target	Realisasi	%
1.	2	3		4	5	6
1.	Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Pembangunan di Segala Bidang Pada Daerah Perbatasan.	1	Tingkat kerjasama yang baik dalam percepatan Pembangunan di Kawasan Perbatasan.	95%	95%	100%
		2	Tingkat kerjasama yang baik dalam Sosial Ekonomi di Kawasan Perbatasan.	100%	99,54%	99,54%
		3	Tingkat kerjasama yang baik dalam Penataan Kawasan / Wilayah Perbatasan.	100%	99,54%	99,54%
		4	Tingkat persiapan, kesiapan, dan kelayakan Pembukaan Border Jagoi Babang.	80%	80%	100%
		5	Tingkat Kesesuaian Kerjasama Lintas Sektoral dalam perencanaan di Wilayah Perbatasan.	100%	99,54%	99,54%
		6	Tingkat Kesesuaian Lintas Batas Antar Negara dalam perencanaan di Wilayah Perbatasan.	100%	92.39%	92.39%



Laporan Kinerja Tahunan
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2019

	7	Meningkatnya Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Negara.	90%	90%	100%
	8	Tingkat Kejelasan dan Kepastian Batas Daerah Kabupaten Bengkayang.	90%	90%	100%
	9	Tingkat kejelasan dan kepastian batas Kecamatan.	95%	95%	100%
	10	Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas Informasi Tanda Batas Negara.	85%	85%	100%
	11	Tingkat Kecukupan dan Kelayakan Tanda Batas Antar Negara.	85%	85%	100%
	12	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Batas Negara.	100%	92.39%	92.39%
	13	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Potensi Perbatasan.	100%	87.63%	87.63%
	14	Prosentase Alokasi Anggaran Melalui Dana Sharing Pemerintah Pusat.	100%	100%	100%
	15	Prosentase Optimalisasi Sosial Budaya di Kawasan Perbatasan.	100%	100%	100%
	16	Prosentase informasi kegiatan Pembangunan Bidang Potensi Kawasan Perbatasan yang telah diketahui masyarakat.	100%	87.63%	87.63%
	17	Prosentase Jumlah Database Potensi di Kawasan Perbatasan.	90%	87.63%	87.63%
	18	Tingkat kesesuaian kegiatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.	90%	99.22%	94.61%
	19	Tingkat persiapan, kesiapan, dan kelayakan pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.	95%	99.22%	97.11%
	20	Prosentase Jumlah Database Infrastruktur Fisik, Infrastruktur Pemerintahan, Sosial Ekonomi Desa Kawasan Perbatasan.	90%	95.54%	92.77%

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2019 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :



Sasaran Strategis

Pengukuran untuk ketercapaian Sasaran : Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Pembangunan di Segala Bidang Pada Daerah Perbatasan, sebagai berikut:

1. Tingkat kerjasama yang baik dalam percepatan Pembangunan di Kawasan Perbatasan.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 100%.
2. Tingkat kerjasama yang baik dalam Sosial Ekonomi di Kawasan Perbatasan
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 99,54%.
Capaian kinerja ini berdasarkan realisasi anggaran kegiatan Fasilitasi/pembentukan penguatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi, Tahun 2019.
3. Tingkat kerjasama yang baik dalam Penataan Kawasan / Wilayah Perbatasan
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 99,54%.
Capaian kinerja ini berdasarkan realisasi anggaran kegiatan Fasilitasi/pembentukan penguatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi, Tahun 2019.
4. Tingkat persiapan, kesiapan, dan kelayakan Pembukaan Border Jagoi Babang
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 100%.
Capaian kinerja ini berdasarkan kegiatan Fasilitasi program peningkatan infrastruktur kawasan perbatasan Negara, Tahun 2019.
5. Tingkat Kesesuaian Kerjasama Lintas Sektoral dalam perencanaan di Wilayah Perbatasan
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 99,54% .
Capaian kinerja ini berdasarkan realisasi anggaran kegiatan Fasilitasi/pembentukan penguatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi, Tahun 2019.
6. Tingkat Kesesuaian Lintas Batas Antar Negara dalam perencanaan di Wilayah Perbatasan
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 92,39%.
Capaian kinerja ini berdasarkan realisasi anggaran kegiatan Fasilitasi penanganan permasalahan dikawasan perbatasan negara, Tahun 2019.
7. Meningkatnya Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Negara
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator



sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 90 % dari target >90%.

Capaian kinerja ini berdasarkan realisasi anggaran kegiatan Fasilitasi penanganan permasalahan dikawasan perbatasan negara, Tahun 2019.

8. Tingkat Kejelasan dan Kepastian Batas Daerah Kabupaten Bengkayang.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 90% dari target >90%.

Capaian kinerja ini berdasarkan realisasi anggaran kegiatan Fasilitasi percepatan penyelesaian batas wilayah administrasi antar daerah, Tahun 2019.

9. Tingkat kejelasan dan kepastian batas Kecamatan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 95% dari target >95%.

Capaian kinerja ini berdasarkan realisasi anggaran kegiatan Fasilitasi percepatan penyelesaian batas wilayah administrasi antar kecamatan Tahun 2019.

10. Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas Informasi Tanda Batas Negara

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 85% dari target >85%.

Capaian kinerja ini berdasarkan realisasi anggaran kegiatan Fasilitasi penanganan permasalahan dikawasan perbatasan negara, Tahun 2019.

11. Tingkat Kecukupan dan Kelayakan Tanda Batas Antar Negara

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 85% dari target >85%.

Capaian kinerja ini berdasarkan realisasi anggaran kegiatan Fasilitasi penanganan permasalahan dikawasan perbatasan negara, Tahun 2019.

12. Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Batas Negara

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 92.39% dari target >100%.

Capaian kinerja ini berdasarkan realisasi anggaran kegiatan Fasilitasi penanganan permasalahan dikawasan perbatasan negara, Tahun 2019.

13. Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Potensi Perbatasan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 87,63% dari target >100%.

Capaian kinerja ini berdasarkan realisasi anggaran kegiatan Fasilitasi program pengembangan potensi kawasan perbatasan negara, Tahun 2019.



14. Prosentase Alokasi Anggaran Melalui Dana Sharing Pemerintah Pusat

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 100%.

Capaian kinerja ini berdasarkan realisasi Dana sharing Pemerintah Pusat untuk Pembangunan di kawasan Perbatasan.

15. Prosentase Optimalisasi Sosial Budaya di Kawasan Perbatasan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 87,63%.

Capaian kinerja ini berdasarkan realisasi anggaran kegiatan Fasilitasi program pengembangan potensi kawasan perbatasan negara, Tahun 2019.

16. Prosentase informasi kegiatan Pembangunan Bidang Potensi Kawasan Perbatasan yang telah diketahui masyarakat

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 87,63%.

Capaian kinerja ini berdasarkan realisasi anggaran kegiatan Fasilitasi program pengembangan potensi kawasan perbatasan negara, Tahun 2019.

17. Prosentase Jumlah Database Potensi di Kawasan Perbatasan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 87,63%.

Capaian kinerja ini berdasarkan realisasi anggaran kegiatan Fasilitasi program pengembangan potensi kawasan perbatasan negara, Tahun 2019.

18. Tingkat kesesuaian kegiatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 94,61% dari target >90%.

Capaian kinerja ini berdasarkan realisasi anggaran kegiatan Fasilitasi program peningkatan infrastruktur kawasan perbatasan negara, Tahun 2019.

19. Tingkat persiapan, kesiapan, dan kelayakan pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 97,11% dari target >95%.

Capaian kinerja ini berdasarkan realisasi anggaran kegiatan Fasilitasi program peningkatan infrastruktur kawasan perbatasan negara, Tahun 2019.



20. Prosentase Jumlah Database Infrastruktur Fisik, Infrastruktur Pemerintahan, Sosial Ekonomi Desa Kawasan Perbatasan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, diperoleh bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 92,77% dari target >90%.

Capaian kinerja ini berdasarkan realisasi anggaran kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan program peningkatan infrastruktur kawasan perbatasan negara, Tahun 2019.

Adapun program kegiatan di tahun 2019 yang mendukung *Sasaran Starategis* diatas adalah sebagai berikut :

- a. **Program peningkatan Kerja sama antar pemerintah daerah**
 - 1) Fasilitasi/ Pembentukan penguatan kerja sama antar daerah pada bidang ekonomi
- b. **Program Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara**
 - 1) Fasilitasi penanganan permasalahan dikawasan perbatasan negara
- c. **Program Pengembangan Potensi Kawasan Perbatasan Negara**
 - 1) Fasilitasi program pengembangan potensi kawasan perbatasan negara
- d. **Program peningkatan infrastruktur kawasan perbatasan negara**
 - 1) Fasilitasi program peningkatan infrastruktur kawasan perbatasan negara
 - 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan program peningkatan infrastruktur kawasan perbatasan negara
- e. **Program penataan batas administrasi**
 - 1) Fasilitasi percepatan penyelesaian batas wilayah administrasi antar daerah
 - 2) Fasilitasi percepatan penyelesaian batas wilayah administrasi antar kecamatan
 - 3) Fasilitasi percepatan penyelesaian batas wilayah administrasi antar desa

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian kinerja masing-masing sasaran hampir tercapai tetapi belum optimal. Belum optimalnya pencapaian sasaran di atas antara lain disebabkan beberapa hambatan/kendala dalam pelaksanaan kegiatannya yaitu sebagai berikut :

1. Kesulitan dalam aspek komunikasi dengan pihak ketiga karena jarak yang jauh, perangkat komunikasi sebagai sarana koordinasi jarak jauh yang belum memadai sehingga intensitas koordinasi yang rendah;
2. Penyampaian laporan progres pelaksanaan kegiatan oleh pihak ketiga terkesan lambat;
3. Penyediaan data yang dilampirkan/disampaikan OPD masih minim sehingga olahan data yang dilakukan terbatas;



Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Upgrade perangkat komunikasi;
2. Meningkatkan intensitas koordinasi dalam rangka sinkronisasi penjadwalan dan realisasinya;
3. Kegiatan pendataan yang komprehensif didorong melalui APBD untuk dilaksanakan oleh OPD teknis agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan guna pertimbangan kebijakan/penyusunan dokumen terkait perencanaan dan kebijakan;

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun 2016, 2017, 2018 dan Target Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2019
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan dan kebijakan yang responsif, antisipatif dan konsisten	1 Tingkat kerjasama yang baik dalam percepatan Pembangunan di Kawasan Perbatasan.	-	-	-	95%
		2 Tingkat kerjasama yang baik dalam Sosial Ekonomi di Kawasan Perbatasan.	-	-	-	100%
		3 Tingkat kerjasama yang baik dalam Penataan Kawasan / Wilayah Perbatasan.	-	-	-	100%
		4 Tingkat persiapan, kesiapan, dan kelayakan Pembukaan Border Jagoi Babang.				80%
		5 Tingkat Kesesuaian Kerjasama Lintas Sektoral dalam perencanaan di Wilayah Perbatasan.	-	-	-	100%
		6 Tingkat Kesesuaian Lintas Batas Antar Negara dalam perencanaan di Wilayah Perbatasan.	-	-	-	100%
		7 Meningkatnya Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Negara.	-	-	-	90%
		8 Tingkat Kejelasan dan Kepastian Batas Daerah Kabupaten Bengkayang.	-	-	-	90%
		9 Tingkat kejelasan dan kepastian batas Kecamatan.	-	-	-	95%
		10 Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas Informasi Tanda Batas Negara.	-	-	-	85%



Laporan Kinerja Tahunan
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2019

		11	Tingkat Kecukupan dan Kelayakan Tanda Batas Antar Negara.	-	-	-	85%
		12	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Batas Negara.	-	-	-	100%
		13	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Potensi Perbatasan.	-	-	-	100%
		14	Prosentase Alokasi Anggaran Melalui Dana Sharing Pemerintah Pusat.	-	-	-	100%
		15	Prosentase Optimalisasi Sosial Budaya di Kawasan Perbatasan.	-	-	-	100%
		16	Prosentase informasi kegiatan Pembangunan Bidang Potensi Kawasan Perbatasan yang telah diketahui masyarakat.	-	-	-	100%
		17	Prosentase Jumlah Database Potensi di Kawasan Perbatasan.	-	-	-	90%
		18	Tingkat kesesuaian kegiatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.	-	-	-	90%
		19	Tingkat persiapan, kesiapan, dan kelayakan pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.	-	-	-	95%
		20	Prosentase Jumlah Database Infrastruktur Fisik, Infrastruktur Pemerintahan, Sosial Ekonomi Desa Kawasan Perbatasan.	-	-	-	90%

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang dimulai pada tahun 2019, sesuai dengan Perda pembentukan OPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang meliputi anggaran serta realisasi belanja pada tahun 2019. Anggaran belanja untuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Target Dan Realisasi Anggaran
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2019**



Laporan Kinerja Tahunan
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2019

No	Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Setelah Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Belanja Operasi	1,438,490,750	1,246,298,975	192.191.775
	- Belanja Pegawai	743,601,500	590,698,006	152.903.494
	- Belanja Barang	694,889,250	655,600,969	39.288.281
2	Belanja Modal	26,204,250	26,004,250	0
	- Belanja Peralatan dan Mesin pengadaan personal komputer.	10,195,100	9,995,100	0
	- Belanja Peralatan dan Mesin pengadaan peralatan personal komputer.	10,743,400	10,743,400	0
	- Belanja Peralatan dan Mesin pengadaan alat pendingin.	5,265,750	5,265,750	0
	Jumlah	1.464.695.000	1.272.303.225	192.191.775

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan sampai akhir tahun 2019 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Nama Program Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Tidak Langsung	556,770,000,00		437,549,506,00	78,59%
1	- Gaji dan Tunjangan	382,130,000,00	22 Orang	382,130,000,00	100%
2	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	0	1 Tahun	0	0
3	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	174.640.000,00	4.712 OH	55,419,506,00	31,73%
2	Belanja Langsung	907.925.000		834.753.719	91,94
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>				
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000,00	2 Jenis	1.200.000	100%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.382.000,00	3 Jenis	900.000	72,69%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	1 Tahun	00	00
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	62.829.000,00	20 Orang	56.921.000	90.60%
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.555.000,00	16 Jenis	655.000	100%
6	Penyediaan alat tulis kantor	63.534.000,00	41 Jenis	63.534.000	100%
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.217.850,00	7 Jenis	16.527.850	90.72%



Laporan Kinerja Tahunan
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2019

8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.028.000,00	7 Jenis	5.028.000	100%
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	525.000,00	4 Surat Kabar	525.000	100%
10	Penyediaan makanan dan minuman	44.640.000,00	21 Orang	42.005.000	94.10%
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	216.234.400,00	21 Orang	213.332.212	98.66%
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	65.075.000,00	21 Orang	64.782.488	99.55%
13	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kantor	55.816.000,00	4 Orang	42.698.600	76.50%
14	Penyediaan Jasa Sewa Sarana Mobilitas	2.950.000,00	2 unit	1.100.000	37.29%
<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>					
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15.460.850,00	7 Jenis	15.260.850	91.61%
2	Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	10.743.400,00	6 Unit	10.743.400	100%
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	23.700.000,00	1 paket	19.350.000	81,65%
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	28.216.000,00	2 Unit	28.216.000	100%
5	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	2.190.000,00	3 Unit	00	00%
<i>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</i>					
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	12.000.000	21 Stel	12.000.000	100%
<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>					
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.917.500	1 Laporan	2.917.500	100%
2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	2.920.000	1 Dokumen	2.920.000	100%
<i>Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pemerintahan</i>					
1	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten	15.000.000	1 Kali Pameran	11.350.000	75.67%
<i>Program Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah</i>					
1	Fasilitasi/ Pembentukan penguatan kerja sama antar daerah pada bidang ekonomi	30.235.000		30.096.150	99,54%
<i>Program Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara</i>					
1	Fasilitasi penanganan permasalahan dikawasan perbatasan negara	54.825.000		50.652.500	92.39%
<i>Program Pengembangan Potensi Kawasan Perbatasan Negara</i>					
1	Fasilitasi program pengembangan potensi kawasan perbatasan negara	24.820.000		21.750.000	87.63%
<i>Program peningkatan infrastruktur kawasan perbatasan negara</i>					



Laporan Kinerja Tahunan
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2019

1	Fasilitasi program peningkatan infrastruktur kawasan perbatasan negara	45.066.000		44.715.999	99,22%
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan program peningkatan infrastruktur kawasan perbatasan negara	9.200.000		8.790.000	95,54%
	<i>Program penataan batas administrasi</i>				
1	Fasilitasi percepatan penyelesaian batas wilayah administrasi antar daerah	4.000.000		4.000.000	100%
2	Fasilitasi percepatan penyelesaian batas wilayah administrasi antar kecamatan	13.285.000		13.285.000	100%
3	Fasilitasi percepatan penyelesaian batas wilayah administrasi antar desa	58.360.000		49.307.170	84,49%
	Jumlah	1.464.695.000,-		1.272.303.225	85,27%

❖ **Belanja Modal**

Belanja Modal dalam tahun 2019 digunakan untuk pembelian peralatan kantor yang terdiri dari :

No	Jenis Peralatan	Anggaran	Realisasi	%	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Televisi LED 32 inci 1 set	Rp. 4.340.000,-	Rp. 4.340.000,-	100	1 unit
2.	Parabola 1 set	Rp. 1.100.000,-	Rp. 1.100.000,-	100	1 unit
3.	Ongkos pasang Televisi LED 32 inci 1 set	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	100	1 unit
4.	Ongkos pasang Parabola	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	100	1 unit
5.	Kulkas	Rp. 2.600.000,-	Rp. 2.600.000,-	100	1 unit
6.	Kipas Angin	Rp. 651.700,-	Rp. 651.700,-	100	3 unit
7.	AC	Rp. 5.265.750,-	Rp. 5.265.750,-	100	1 unit
8.	Laptop	Rp. 7.700.000,-	Rp. 7.700.000,-	100	1 unit
9.	Printer	Rp. 3.043.400,-	Rp. 3.043.400,-	100	1 unit
	Jumlah	Rp. 26,004,250,-	Rp. 26,004,250,-		

Belanja Modal pada tahun 2019 dengan pagu anggaran Rp. 26,004,250,- terealisasi Rp. 26,004,250,- atau 100%.

LAMPIRAN